EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

Inflasi dan Stabilitas Ekonomi : Analisis Perbandingan Perspektif Islam dan Konvensional

Anriza Witi Nasution[1*] & M. Shabri Abd. Majid[2]
[1]Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
[2]Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111
*e-mail: anrizanasution@polmed.ac.id

Artikel Info

Received :
24 Juli 2023
Revised :
12 November 2023
Accepted :
20 November 2023

Kata Kunci:
Inflasi, stabilitas ekonomi, perspektif Islam, perspektif konvensional

Keywords:
Inflation, economic stability, Islamic perspective, conventional perspective

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif inflasi dan stabilitas ekonomi antara perspektif Islam dengan perspektif konvensional. Penelitian ini juga membandingkan tingkat inflasi di negara yang menerapkan sistem bunga dan tanpa bunga. Penelitian ini bersifat kualitatif deskripstif dengan metode studi Pustaka (*library reaseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi yang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berulang. Dalam perspektif Islam, seharusnya harga seimbang, karena uang merupakan berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung. Namun kondisi ekonomi menjadi tidak stabil karena perbedaan antara permintaan dengan penawaran dan perbedaan jumlah uang dengan jumlah barang dan jasa. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi, Islam menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa sehingga sistem bunga tidak terlibat dalam ekonomi. Para ulama dan ekonom Islam terus melakukan penelitian untuk menemukan cara mengatasi inflasi guna mencapai kestabilan ekonomi, antara lain menerapkan kebijakan fiskal dan moneter islami. Negara yang menerapkan sistem bunga pada kenyataannya mengalami inflasi yang lebih tinggi dari pada negara yang tidak menerapkan sistem bunga.

Inflation and Economic Stability: A Comparative Analysis between Islamic and Conventional Perspectives

ABSTRACT

This study aims to analyze comparatively inflation and economic stability between the Islamic perspective and the conventional perspective. This study also compares the inflation rate in countries that apply an interest system and without interest. This research is descriptive qualitative with library research method. The results show that inflation has occurred since the time of the Prophet Muhammad and continues to repeat itself. In an Islamic perspective, prices should be balanced, because money is a medium of exchange and a unit of account. However, economic conditions become

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

unstable because of the difference between supply and demand and the difference in the amount of money with the amount of goods and services. To maintain economic balance, Islam applies the principles of profit sharing, buying and selling, and renting so that the interest system is not involved in the economy. Islamic scholars and economists continue to conduct research to find ways to overcome inflation in order to achieve economic stability, including implementing Islamic fiscal and monetary policies. Countries that apply the interest system in fact experience higher inflation than countries that do not apply the interest system.

PENDAHULUAN

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas. Inflasi dalam dunia ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, menghambat investasi, dan ketidakpastian stabilitas ekonomi.

Inflasi bukanlah merupakan suatu fenomena baru, sesungguhnya sejak jaman pemerintahan Rasulullah SAW inflasi telah terjadi. Bahkan peradaban kuno mediterania pun telah mengalami inflasi. Inflasi telah melanda kehidupan masyarakat di dunia dari zaman dahulu hingga sekarang. Maka dari itu, setiap negara dapat mengalami inflasi dengan berbagai penyebab.

Inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan yang akan berdampak pada jumlah pengangguran di masa yang akan datang. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi karena dapat mendistorsi bebagai bidang kegiatan ekonomi dan mempengaruhi hampir semua keputusan agen ekonomi. Oleh sebab itu, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah sebagai pegambil kebijakan suatu negara, maupun masyarakat.

Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai tingkat yang diinginkan. Baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Zarqa menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam yang berbasis ekuitas (free interest rate) dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kestabilan ekonomi, sementara sistem berbasis bunga akan menggangu stabilitas ekonomi (Zarqa, 1983).

Penelitian sebelumnya kebanyakan mengkaji tentang inflasi berdasarkan konsep pemikiran Al Maqrizi (Akbar, 2019; Rizqon, 2022; Siregar, 2020; Suar, 2020; Zainal, 2020), moneter dan stabilitas ekonomi dalam perspektif Islam (Atika, 2018; Chapra, 1996; Selim, 2019; Zarqa, 1983), perbandingan inflasi dalam dalam perspektif Islam dan konvensional (Suharti, 2021) inflasi dan kebijakan moneter (Elhannani, 2013).

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang memaparkan hasil analisis secara komprehensif tentang inflasi dan stabilitas ekonomi dalam perspektif Islam dan konvensional serta inflasi di negara yang menerapkan sistem bunga dan tanpa bunga. Umumnya penelitian terdahulu hanya membahas tentang inflasi dalam perspektif Islam dan atau konvensional serta kebijakan untuk mengatasi inflasi saja.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif inflasi dan stabilitas ekonomi antara perspektif Islam dengan konvensional. Penelitian ini juga membandingkan tingkat inflasi di negara yang menerapkan sistem bunga dan tanpa bunga.

Kami berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memperkaya referensi dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi makro, khususnya tentang inflasi dan stabilitas ekonomi. Selain itu hasil penelitian ini dapat pula dijadikan referensi kebijakan untuk mengurangi dampak dan mengatasi inlfasi.

KAJIAN TEORI

Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Inflasi disebut pula sebagai salah satu komponen suku bunga (Kareem, 2013). Sukirno menyatakan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (Sukirno, 2002).

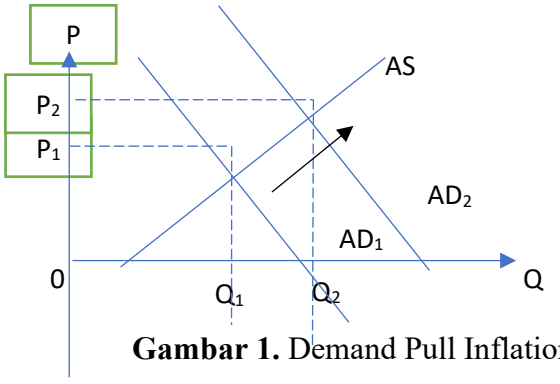
Henry mendefinisikan pada dasarnya, inflasi adalah penurunan nilai atau daya beli uang. Kemmerer menyebutkan inflasi adalah situasi di mana terlalu banyak mata uang ada dalam kaitannya dengan volume fisik bisnis (Kareem, 2013). Mankiw berpendapat bahwa inflasi adalah kecenderungan harga–harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2006). Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Al-Maqrizi berdasarkan fakta bencana kelaparan yang terjadi di Mesir menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya mereka (konsumen) harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama (Amalia, 2005).

Inflasi dalam Perspektif Konvensional dan Islam

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu (Nopirin, 2000): 1) Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*), 2) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), dan 3) Inflasi Tnggi (*Hyper Inflation*).

Berdasarkan penyebabnya, ada 2 jenis inflasi, yaitu (Huda, 2007): Pertama, Demand Pull Inflation, terjadi karena kenaikan harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan anggregat (AD) yang lebih besar dari penawaran agregat (AS). Artinya inflasi terjadi jika pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial.



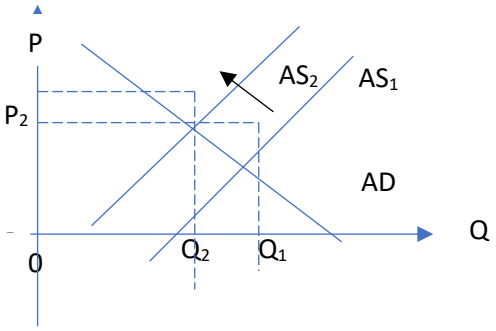
Gambar 1. Demand Pull Inflation

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

Kondisi inflasi ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dari (atau melebihi) penawaran pada tingkat kesempatan kerja penuh. Tingkat kesempatan kerja penuh berarti bahwa tidak ada peningkatan output agregat, yaitu. produksi barang dan jasa telah mencapai optimalnya. Jika pada tingkat kesempatan kerja penuh, permintaan investasi meningkat, permintaan agregat barang dan jasa akan melebihi penawaran agregatnya. Artinya ada ketidakseimbangan, yang hanya dapat dikoreksi oleh satu dari cara berikut: 1) kenaikan harga untuk mengurangi permintaan atau 2) peningkatan output untuk memenuhi permintaan atau keduanya.

Peningkatan *output* guna memenuhi permintaan atau keduanya tidak mungkin karena kita berasumsi bahwa kita memiliki tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, yang pertama terjadi untuk membawa keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran. Kondisi ini tidak dapat dihindari akan mengarah pada inflasi.

Kedua, Cost Push Inflation yang terjadi disebabkan peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya. Jika permintaan bahan baku melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Prosuden akan membayar lebih mahal bahan baku yang berdampak pada penetapan harga jual produk yang lebih tinggi kepada pedagang dan pedagang juga menaikkan harga kepada konsumen



Gambar 2. Cost Push Inflation

Produsen monopolistik dan oligopolistik dapat memutuskan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi untuk meningkatkan tingkat keuntungan mereka. Ini ditambahkan ke biaya dan diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan inflasi dorongan laba. Dapat dinyatakan bahwa kedua-duanya, baik inflasi karena tarikan permintaan dan desakan biaya, saling berkaitan erat, jika kenaikan harga bukan karena manipulasi entrepreneur saja. Entreneur dan kenaikan upah adalah karena untuk mempertahankan standar hidup yang wajar dari karyawan, peningkatan seperti itu diperbolehkan dalam ekonomi Islam.

Ekonom Islam, Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja melainkan karena faktor kesalahan manusia. Sehingga berdasarkan faktor penyebabnya Al-Maqrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi atas: *Pertama*, Natural Inflation, yang disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat (Karim, 2014).

Al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Jika memakai

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

perangkat konvensional yaitu persamaan identitas konsep Irving Fisher: MV = PT =Y (Karim, 2007). *Natural Inflation* dapat diartikan sebagai: 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). 2) Naiknya daya beli masyarakat secara rill.

Natural Inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan yakni: 1) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor mengalami peningkatan sedangkan impor menurun sehingga *net export* nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif. 2) Akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya pacekelik, perang, ataupun embargo dan *boycott* (Karim, 2007).

Kedua, Human Error Inflation yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Akibat dari kesalahan manusia ini sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum:41 sebagai berikut:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "*Telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebebabkan karena perbuatan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*".

Berdasarkan penyebabnya, human error inflation terbagi atas: 1)Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administration*); 2) Pajak yang berlebihan (*excessive tax*); 3) Pencetakan uang berlebih (*excessive seignorage*) (Karim, 2007).

Dampak Inflasi

Inflasi akan membawa dampak: *Pertama*, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena inflasi menyebabkan berkurang atau rendahnya daya beli masyarakat, jika orang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap. *Kedua*, memperburuk distribusi pendapatan terjadi karena masyarakat berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Namun pemilik kekayaan tetap misalnya tanah dan bagunan dapat mempertahankan atau bahkan menambah nilai riil kekayaannya. Sehingga inflasi akan menyebabkan distribusi pendapatan pada golongan berpendapatan tetap dan para pemilik kekayaan tetap akan semakin tidak merata (Rahardja, 2004).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi penelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan hal yang dibahas (Nazir, 2012). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data berupa karya ilmiah baik berupa buku maupun artikel yang telah dimuat di jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional. Jurnal-jurnal yang ditelaah dan dijadikan rujukan merupakan jurnal yang membahas tentang inflasi maupun kestabilan ekonomi baik dengan memperhatikan konteks pembahasan baik dari perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efek inflasi berpengaruh beda bagi masing-masing pelaku ekonomi. Beberapa pelaku ekonomi diuntungkan sementara yang lan terkena dampak negatif. Hal ini dikarenakan tidak serupanya pergerakan harga barang, jasa, aset dan lain sebagainya yang menyebabkan inflasi.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

Pekerja, pekerja tetap, kreditur, deposan, dan pensiunan akan kehilangan kekayaan dan penurunan daya beli sebagai dampak inflasi. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah debitur, pemegang saham, produsen, pedagang, pemilik real estate.

Dampak buruk inflasi dapat terjadi jika produsen mengalihkan sumber daya dari produksi barang esensial ke non-esensial karena harapan mereka akan keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan terkadang dengan menjual komoditas di bawah standar untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Produsen juga dapat menimbun produknya agar terjadi kelangkaan. Karena ketakutan nilai uang berkurang drastis maka orang cenderung untuk tidak menabung, tetapi membeli aset. Dampak lainnya adalah terjadinya spekulasi selama masa inflasi karena produsen banyak berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan cepat.

Inflasi juga akan berdampak pada kondisi sosial, akan semakin lebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin serta timbulnya ketidakpuasan karena biaya hidup yang tinggi.

Penimbunan, pemasaran gelap, komoditas di bawah standar, spekulasi dan sejenisnya menjadi ciri masyarakat yang diliputi inflasi. Secara politik, inflasi dapat menyebabkan jatuhnya pemerintahan sebagai akibat dari agitasi dan protes partai politik yang menentang pemerintah. Inflasi dapat mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara secara negatif jika harga naik lebih cepat daripada di luar negeri, produknya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara lain. Efeknya adalah bahwa impor akan meningkat sementara ekspor akan menurun, sehingga menyebabkan masalah neraca pembayaran.

Lemahnya kecenderungan masyarakat untuk menabung di masa inflasi akan mengurangi akumulasi modal yang akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan standar hidup masyarakat.

Saat tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar tinggi, tingkat inflasi akan meningkat. Keduanya berbanding lurus. Artinya, meningkatkan jumlah uang beredar tanpa disertai peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Jika pendapatan disposabel meningkat, akan menuntut lebih banyak barang dan jasa yang persediaannya terbatas. Efeknya adalah tingginya tingkat inflasi.

Pengaruh inflasi menimbulkan dikotomi antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga pasar. Hal ini karena dengan meningkatnya inflasi, pengembalian yang dibutuhkan oleh seorang investor juga akan meningkat untuk menutupi hilangnya daya beli uangnya. Uang mengukur pengembalian dalam hal ini tentu saja, jatuh nilainya. Uang yang dibayarkan pada masa akan datang adalah tingkat nominal. Namun, jika dinyatakan dalam nilai uang pada tahun yang sama, maka digunakan kurs riil. Tingkat bunga uang yang merupakan tingkat bunga pasar menangani kompensasi yang harus diperoleh investor dari penurunan nilai riil modalnya sebagai akibat dari kenaikan harga yaitu inflasi sedangkan tingkat bunga riil adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor jika inflasi tidak dipertimbangkan.

Dapat pula terjadi, tingkat bunga uang mungkin lebih rendah dari tingkat inflasi. Ini berarti bahwa tingkat pengembalian riil akan negatif. Investor masih dapat menginvestasikan uangnya jika dia tidak dapat menemukan investasi yang lebih baik yang dapat memberinya tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan/atau dia tidak ingin memegang uang tunai. Ini karena uang tunai tidak dapat menghasilkan sedangkan bunga akan memberinya sesuatu meskipun itu mungkin tidak cukup. Dalam hal ini, semua yang dianggap sebagai tingkat bunga adalah tingkat inflasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, inflasi akan berdampak secara keseluruhan, seperti memburuknya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang, rusaknya rencana jangka panjang para pelaku ekonomi yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

negara. Inflasi yang tidak segera ditangani akan susah untuk dikendalikan dan cenderung akan meningkat dalam waktu yang singkat.

Inflasi dalam Perspektif Islam

Para ekonom Islam berpendapat, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena empat hal sebagai berikut:

a. Inflasi mengganggu fungsi dari: uang, tabungan (nilai simpan), pembayaran di muka, dan unit penghitungan. Akibat inflasi, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi bisa menyebabkan inflasi lagi (*self feeding inflation*).
b. Inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*).
c. Inflasi meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk non-primer dan barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*).
d. Inflasi mengarahkan investasi non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing.

Islam tidak mengenal istilah inflasi, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya

Al Maqrizi yang merupakan ekonom muslim dan juga salah satu murid Ibnu Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*Natural inflation*) dan inflasi akibat kesalahan manusia (*Human Error Inflation*).

Berdasarkan sejarah, Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau peperangan. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ash-Syaukan sebagai beriku t:
"*Orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal patoklah harga untuk Kami. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan Aku sungguh berharap bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pund alam darah dan harta*"

Hadist ini menjelaskan bahwa harga yang naik merupakan akibat inflasi yang alamiah yang merupakan takdir Allah, yang dapat diselesaikan Allah. Campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar akan menimbulkan kerancuan (Suharti, 2021). Pemerintah berperan mengatur pasar dan mengawasinya guna agar tidak terjadi distorsi pasar seperti penimbunan barang dan memperlancar distribusi.

Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW juga sudah terjadi inflasi dimana disebutkan telah terjadi kenaikan harga yang sudah sampai menyebabkan banyak masyarakat kesulitan atau dengan kata lain mengakibatkan kondisi perekonomian tidak lagi stabil dimasa itu.

Selain itu, pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab R.A. juga pernah terjadi inflasi. Pada masa itu eksportir yang menjual barangnya ke luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri (impor) lebih sedikit jumlahnya dari barang yang mereka jual (*positive net export*). Adanya *positive net export* akan menjadikan keuntungan yang berupa kelebihan uang yang akan dibawa ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat. Naiknya permintaan agregat akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Untuk mengatasi keadaan ini Umar melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut, akibatnya terjadi penurunan permintaan agregatif, dan tingkat harga kembali normal.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

Permasalahan inflasi pada masa khalifah Umar bin Khattab R.A. ini dapat kita kategorikan ke dalam *natural inflation* jika kita mengacu kepada jenis inflasi yang dikemukakan oleh Al Maqrizi. Namun bila ditarik ke teori ekonomi konvensional hal ini dapat kita kategorikan sebagai *demand pull inflation.*

Pembahasan inflasi tentunya tak lepas dari pembahasan harga, Al Maqrizi menyatakan ketidakstabilan rasio emas-perak memungkinkan koin buruk untuk mengusir koin yang baik dari peredaran dan dia menambahkan bahwa fakta kelimpahan koin tembaga (fulus) memperburuk situasi. Dengan demikian, fenomena inflasi disebabkan oleh ditinggalkannya standar emas dan perak. Analisis penawaran dan permintaan untuk menjelaskan kenaikan tingkat harga juga terjadi dipemikiran Islam. Ibn-Khaldun menekankan bahwa kenaikan permintaan atau penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga (Elhannani, 2013).

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang (*supply*) yaitu produksi lokal dan impor yang diminta. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang menggangu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang menggangu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*. Sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar.

Untuk menerapkan harga yang adil, Ibnu Taimiyah menentang adanya praktik monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga dan menindak pelaku monopoli. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik diantara masyarakat. Selain itu ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks.

Saat kita membahas inflasi tidak terlepas dari pembahasan uang. Para ekonom konvensional menyatakan bahwa uang juga merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan karena uang memiliki 4 fungsi, yaitu alat tukar, unit hitung, penyimpan nilai, dan untuk pembayaran yang ditangguhkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas moneternya untuk membuatnya stabil karena semakin stabil nilai komoditas atau token tertentu, semakin baik ia dapat bertindak sebagai penyimpan nilai dan semakin berguna sebagai uang. Tingkat inflasi yang optimal harus nol seperti yang diungkapkan oleh LeBlanc jika uang ingin diakui sebagai tolok ukur yang dengannya transaksi ekonomi dapat diukur. Peran uang, sebagai unit hitung, sebagai alat transaksi, dan sebagai penyimpan nilai juga akan dipertahankan (Kareem, 2013).

Di sisi lain, bunga dianggap sebagai biaya meminjam sejumlah uang. Jika uang dipinjamkan dengan cara demikian, maka sama seperti komoditas yang dijual, pertukaran seperti itu adalah bunga, yang berarti uang dianggap sebagai komoditas yang membawa dividen berupa bunga. Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan barang dagangan, sehingga sebagaimana yang diketahui bersama bunga yang demikian itu adalah haram.

Sementara itu Masyarakat membutuhkan uang untuk memproduksi dan menukar barang dan jasa dan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang terkait dengan operasi tersebut. Sementara larangan riba (bunga) mutlak diakui dalam penelitian Islam. Penelitian Ahmad menunjukkan bahwa Mesir memiliki optimis yang tinggi untuk penerapan system moneter Islam, walaupun beberapa negara menyatakan tidak optimis. Namun mesir menyatakan perbankan sukses berpartisipasi dalam konsep bagi hasil yang meningkatkan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

kemandirian, manajemen yang inovatif dan promosi yang efisien di perbankan syariah (Ahmad, 2017).

Keuangan Islam menganut prinsip, yaitu larangan riba dan larangan gharar. Syariat Islam juga memberikan seperangkat norma etnis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak ekonomi dan melakukan transaksi ekonomi dan keuangan. Norma-norma tersebut berkaitan dengan akuntabilitas manusia dan lingkungannya serta perilaku di antara manusia. Memberi orang hak nya adalah prinsip utama dari sistem etika Islam yaitu kesetaraan dan keadilan. Beberapa dorongan seperti kebajikan, pemurnian pendapatan, transparansi dan pengungkapan yang tepat, dokumentasi transaksi yang mengarah pada ketepatan tentang hak dan kewajiban para pihak dan etika komprehensif yang membutuhkan kepedulian terhadap orang lain juga merupakan bagian dari kerangka norma bisnis Islam (Elhannani, 2013). Untuk menghindari transaksi terlarang tersebut dapat dilakukan bisnis dengan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun sewa.

Pemerintah dan otoritas moneternya harus mengendalikan inflasi dan deflasi untuk menghindari perlunya indeksasi. Inflasi, sebagian besar waktu dibuat secara artifisial. Ini harus dihindari agar uang lebih berguna sebagai penyimpan nilai.

Al Maqrizi menyatakan inflasi dapat diatasi dengan cara menghilangkan penyebab inflasi itu sendiri, yaitu menghilangkan korupsi, perpajakan yang berlebihan, dan penciptaan mata uang yabg berlebihan. Al Maqrizi menekankan penggunaan dinar dan dirham sebagai salah satu solusi mengatasi inflasi (Siregar, 2020).

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera pemerintah Islam menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan tersebut telah dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW, diteruskan pada masa khulafaur rasyidin dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Maka dari itu jelaslah untuk mengatasi inflasi bisa dilakukan dengan berbagai kebijakan, baik moneter, fiskal maupun kebijakan non moneter. Upaya ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang memberikan peran pada negara/pemerintah untuk campur tangan dalam ekonomi dan berkuasa mengatur prinsip perimbangan antara memperjuangkan diri sendiri dengan prinsip mengutamakan kebajikan dalam masyarakat.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat digunakan secara efektif untuk mengendalikan inflasi. Pengurangan pengeluaran pemerintah menyebabkan pergeseran ke kiri dan ke bawah dalam permintaan agregat. Untuk penawaran agregat tertentu, ini menghasilkan penurunan tingkat harga. Oleh karena itu, perampingan pemerintah mengurangi tingkat inflasi.

Cara lain untuk mengurangi tingkat inflasi menggunakan kebiajakan fiskal adalah dengan menaikkan pajak. Kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi penawaran agregat. Misalnya, pengurangan atau penghapusan pajak terdistorsi akan menghasilkan peningkatan penawaran agregat dan penurunan tingkat harga. Lebih jauh lagi, pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk sebagian besar investasi infrastruktur menyebabkan pergeseran ke kanan dalam penawaran agregat dan penurunan tingkat harga.

Selain itu, zakat juga dapat dijadikan instrument kebijakan fiscal. Model yang dikemukakan Bashir membuktikan bahwa pemerintah dalam ekonomi Islam dapat secara efektif menerapkan kebijakan fiskal menggunakan Zakat. Fakta menunjukkan bahwa tarif Zakat tetap mengurangi distorsi yang diciptakan oleh variasi tarif pajak. Penerimaan dari Zakat dan dari penciptaan uang dapat digunakan untuk membiayai program sektor publik dan/atau membiayai defisit anggaran. Untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan moneter dan fiskal harus dikoordinasikan secara erat. Namun, model kami adalah kasus khusus, karena mengasumsikan lingkungan pembagian keuntungan murni. Namun model ini

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

mungkin akan bekerja lebih baik sebagai deskripsi ekonomi tertutup yang lebih kecil (Bashir, 2002).

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter juga dapat digunakan secara efektif untuk mengurangi inflasi dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ini bank sentral meminjamkan dana berbunga ke sistem perbankan. Sistem perbankan pada gilirannya memberikan pinjaman berbunga kepada agen-agen dalam perekonomian. Dengan cara ini, sistem perbankan meningkatkan jumlah uang beredar. Jika dilihat bahwa hanya sebagian kecil dari pinjaman ini diarahkan pada produksi barang dan jasa. Sisanya sebagian besar digunakan untuk kredit konsumen, kegiatan spekulatif, dan lain sebagainya yang hanya berkontribusi terhadap inflasi.

Dalam sistem ekonomi Islam, jumlah uang beredar adalah murni endogen dan dihasilkan oleh beberapa pinjaman tanpa bunga dari bank sentral ke sistem perbankan. Sistem perbankan meminjamkan dana kepada agen ekonomi berdasarkan perjanjian bagi hasil-risiko. Akibatnya, pinjaman diarahkan pada produksi barang dan jasa sedemikian rupa untuk memastikan investasi dapat membayar sendiri. Pinjaman akhirnya dibayarkan kembali ke bank sentral. Dengan cara ini dipastikan bahwa aset produktif selalu mendukung mata uang yang berlaku. Ada dua karakteristik penting untuk pinjaman ini, yaitu: pertama, pinjaman dapat tumbuh tanpa batasan, kedua pinjaman yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak hanya non-inflasi dari waktu ke waktu, tetapi juga kontra-inflasi (Kia, 2014).

Pembiayaan hutang dan pemborosan ekonomi ditambah faktor-faktor lain yang diketahui dapat menyebabkan inflasi dalam sistem ekonomi konvensional, tetapi karena pembiayaan hutang digantikan oleh pembiayaan ekuitas dan konsumsi yang boros sangat tidak dianjurkan dalam sistem Islam, segala sesuatunya tetap sama, tingkat inflasi harus lebih rendah dalam sistem ini. Hukum Islam menjamin aliran tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya *cost-push inflation* adalah nihil atau sangat rendah. Tingkat bunga nol yang telah ditentukan sebelumnya dalam sistem Islam, bertentangan dengan tingkat bunga positif dalam sistem konvensional, membantu menjaga tingkat inflasi lebih rendah dalam jangka panjang (Kia, 2014).

Larangan bunga inilah yang membedakan instrumen kebijakan moneter Islam dan konvensional (Elhannani, 2013):

a. Rasio cadangan wajib
   Rasio ini adalah persentase simpanan yang harus dimiliki oleh bank umum dalam bentuk yang ditentukan oleh bank sentral. Cadangan yang diperlukan melindungi hak para deposan dan mendorong mereka untuk menginvestasikan uang mereka di bank. Instrumen ini tidak bertentangan dengan syariah, bebas dari bunga. Bank sentral di bawah prinsip-prinsip Islam dapat menggunakannya untuk membatasi ketersediaan dana pinjaman dan pasokan uang sehingga dapat mensterilkan harga-harga yang naik. Bank sentral Islam juga dapat menggunakan cadangan ini dalam kegiatan ekonomi baik dengan membiayai beberapa sektor dengan prioritas atau memberikannya kepada pemerintah sebagai Qard Hassan.
b. Rasio bagi hasil
   Instrumen ini tersedia hanya untuk bank sentral syariah dan menggantikan suku bunga sebagai alat kontrol kredit di bank sentral konvensional. Dalam sistem perbankan Islam, jumlah uang beredar dan tingkat aktivitas ekonomi akan diatur oleh pengaturan bagi hasil antara bank komersial dan klien mereka di satu sisi, dan bank dan deposan mereka di sisi lain. Dengan demikian, bank sentral akan mengatur

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

"rasio saham investasi" dan "rasio saham deposan". Rasio ini memiliki efek langsung pada jumlah uang beredar dan bank sentral dapat mengubahnya sesuai dengan situasi kegiatan ekonomi. Dalam IFS, penciptaan uang didukung oleh peningkatan produksi yang mengarah pada tidak adanya inflasi Artinya, bank sentral dapat meningkatkan rasio saham investor dan deposan untuk meningkatkan investasi dan produksi dan untuk menyerap kelebihan uang beredar dari deposan.

c. Operasi pasar terbuka
Operasi pasar terbuka adalah fakta pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah, emas dan cadangan mata uang oleh bank sentral untuk mempengaruhi ketersediaan kredit dan uang beredar. Karena larangan Riba, surat berharga dengan tingkat bunga tidak diperbolehkan dalam operasi pasar terbuka di IFS. Ariff membahas tentang obligasi bebas bunga, dan Siddiqi memvisualisasikan bahwa bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga di pasar terbuka. Bank sentral juga diperbolehkan bertransaksi dengan saham karena mereka memiliki prinsip keuntungan bukan suku bunga. Namun, sarjana Islam lainnya menemukan alat ini terutama surat kabar komersial tidak dapat diterima karena mereka menawarkan ruang lingkup yang tidak terbatas untuk spekulasi liar dan semua spekulasi tidak Islami.

d. Rasio pembiayaan kembali
Rasio pembiayaan kembali mengacu pada tawaran Bank Sentral untuk menyediakan uang tunai tambahan kepada bank-bank komersial sejauh persentase tertentu dari pinjaman bebas bunga yang diberikan oleh mereka. Menaikkan atau menurunkan rasio ini akan berdampak pada perluasan atau pengurangan pasokan kredit jangka pendek oleh bank umum. Misalnya, untuk mendorong Qardh Hasan, bank sentral dapat menetapkan bahwa ia akan membiayai kembali, gratis, sampai tingkat, katakanlah 30 persen, atau persentase lain dari total pinjaman jenis tertentu yang diberikan oleh bank komersial kepada masyarakat.

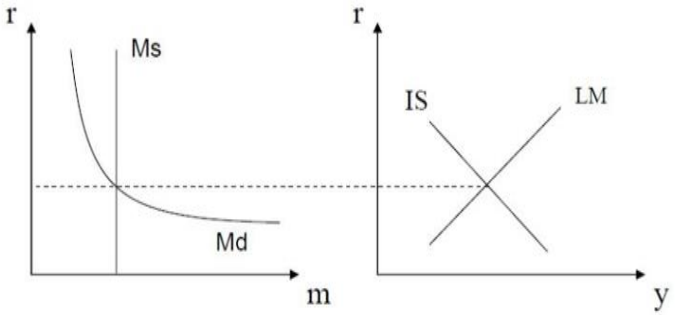
e. Bujukan moral
Instrumen kualitatif ini tidak berbeda dengan yang ada pada sistem konvensional. Cara ini digunakan untuk mempengaruhi dan/atau membujuk bank-bank anggota agar melaksanakan kebijakan bank sentral dengan semangat yang sebenarnya. Ini bisa menjadi instrumen kontrol yang sangat berguna dalam sistem Islam bebas bunga yang harus bergantung pada pembangunan konsensus kolektif untuk urusannya.

Keseimbangan Ekonomi dalam Perpektif Islam

Meskipun tingkat bunga dilarang dalam system ekonomi Islam, namun dimungkinkan untuk menggunakan analisis IS-LM dalam perspektif Islam dengan memasukkan rasio bagi hasil daripada tingkat bunga dalam sistem konvensional.

Pada sistem konvensional, model IS-LM menampilkan analisis penawaran agregat dan permintaan agregat dimana kurva IS menunjukkan kombinasi output total dan tingkat bunga yang menjamin keseimbangan pasar barang, dan kurva LM menunjukkan kombinasi output total dan tingkat bunga yang menjamin keseimbangan pasar uang.

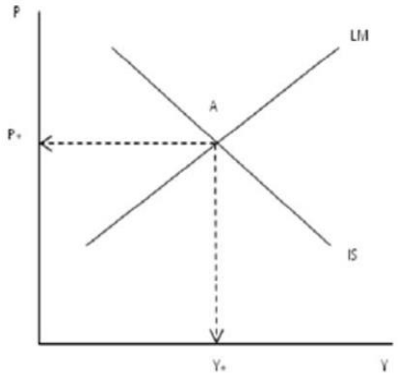
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902



Sumber : (Elhannani, 2013)
Gambar 3. Kurva Keseimbangan Pasar Uang dan IS-LM

Jika Bank sentral mengintervensi kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dengan menurunkan volume uang menggunakan instrumen moneter. Kebijakan moneter kontraktif menurunkan jumlah uang beredar secara langsung dengan menggunakan instrumen kontrol uang agregat atau dengan meningkatkan tingkat bunga dalam operasi pasar terbuka yang pada gilirannya menyebabkan penurunan jumlah uang beredar karena hubungan negatif antara tingkat bunga dan permintaan uang untuk spekulatif. Dengan demikian, kurva LM akan bergerak ke atas yang menciptakan titik ekuilibrium baru dari model (Elhannani, 2013).

Dalam kerangka ekonomi Islam, analisis IS-LM untuk kebijakan moneter tidak sepenuhnya berbeda. Para ulama Islam memasukkan konsep *profit loss sharing ratio* (PLS) sebagai pengganti tingkat bunga. Iqbal dan Alasaly memodifikasi model IS-LM untuk ekonomi Islam sehingga menghasilkan ekuilibrium di pasar uang dan barang dengan memasukkan instrument zakat sebagai berikut:



Sumber : (Elhannani, 2013)
Gambar 4. Keseimbangan IS-LM dalam Sistem Bebas Bunga

Bentuk kurva pada gambar 4 mirip dengan keseimbangan IS-LM pada sistem konvensional. Kemiringan kurva IS ke bawah dalam sistem Islam disebabkan oleh hubungan negatif antara investasi dan tingkat bagi hasil bank, sedangkan kemiringan kurva LM ke atas disebabkan oleh hubungan negatif antara tingkat keuntungan dan permintaan uang dalam kontrak syariah karena permintaan spekulatif dilarang). Dalam konteks ini, saat bank sentral menargetkan inflasi, dapat menurunkan jumlah uang beredar menggunakan instrumen moneter yang disebutkan di bagian sebelumnya yang akan meningkatkan rasio bagi hasil (PLS) yang pada gilirannya menurunkan investasi menggerakkan kurva LM ke kiri dan mengarah ke tingkat keseimbangan baru. Ini

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

menunjukkan bahwa bank sentral dalam sistem konvensional juga harus mengendalikan tingkat bunga operasi pasar terbuka.

Bank sentral Islam harus berhati-hati dalam operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan harus tetap mempertimbangkan penghapusan bunga dan transaksi spekulatif. Pejabat moneter menggunakan saham komersial atau sertifikat Musyarakah sebagai alat pengganti untuk kontrol berbasis bunga dan operasi pasar terbuka. Biasanya pemerintah Islam menerbitkan saham komersial atau sertifikat Musyarakah atas dasar bagi hasil. Jadi, setiap kali pemerintah ingin menurunkan volume uang dalam perekonomian, ia menjual sertifikat ini kepada publik. Di sini tingkat keuntungan dari saham komersial ini memainkan peran tingkat bunga dalam proses kebijakan moneter dan dengan mengubah tingkat ini, bank sentral dapat membujuk orang untuk membeli atau menjual sertifikat ini. Poin pentingnya adalah, bank sentral harus menerbitkan semua surat-surat dan sertifikat berdasarkan beberapa proyek ekonomi produktif jika tidak prinsip bagi hasil tidak bekerja (Elhannani, 2013).

Maka dari itu ada empat alasan mengapa sistem ekonomi Islam yang bebas bunga diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi (Zarqa, 1983). *Pertama*, system ekonomi Islam menawarkan pembiayaan dengan skema bagi hasil melalui akad-akad bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah. *Kedua*, sistem ekonomi Islam melarang adanya spekulasi. permintaan uang spekulatif yang merupakan salah satu sumber ketidakstabilan dalam sistem keynesian akan berkurang secara signifikan dalam ekonomi islam. Chapra mengatakan pengadaan zakat di sisi lain akan mencegah orang memegang uang kas berlebihan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Pinjaman berbunga tidak akan lagi tersedia untuk memicu spekulasi yang kumulatif. *Ketiga*, lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil akan menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi dan risiko juga disistribusikan Bersama. *Keempat*, keuangan internasional seperti pergerakan uang yang sering menjadi faktor destabilitasi sebagai respon atas perubahan suku bunga akan mengalami perubahan karena konsep bagi hasil yang diterapkan lebih stabil daripada tingkat bunga.

Selain itu, dalam perspektif Islam, inflasi didorong oleh kondisi sosial dan ketidakstabilan politik (faktor eksternal), spekulasi, sism fiskal yang tidak efektif, hedonisme, tidak stabilnya sistem moneter, korupsi dan tingkat bunga. Sistem keuangan Islam yang menekankan nilai moral, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi krisis melalui ayanan keuangan Islam seperti keuangan mikro Islam, zakat, sedekah, wakaf dan *qardh al hasan*.

Perbandingan Inflasi di Negara yang Menerapkan Sistem Bunga dan Prinsip Islam

Perbandingan antara negara Arab Saudi yang menjunjung tinggi prinsip Islam dan melarang bunga dengan Nigeria yang menggunakan system konvensional. Keduanya merupakan negara penghasil minyak. Perbandingan tingkat inflasi kedua negara tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi Arab Saudi jauh lebih rendah daripada tingkat inflasi di Nigeria dalam kurun waktu 1980-2010 walaupun Nigeria tidak pernah mengalami inflasi 2 digit selama selama tahun 1960-an (Kareem, 2013).

Sejak tahun 1981, Nigeria mengalami inflasi 2 digit bahkan mencapai 72,73 digit di tahun 1995. Salah satu penyebab terjadinya inflasi tersebut adalah terjadinya defisit keuangan. Sementara defisit keuangan Arab Saudi lebih kecil. Penyebab lain inflasi tersebut adalah tingkat suku bunga yang tinggi. Sehingga jika dibandingkan antara Nigeria dan Arab Saudi, di Arab Saudi pinjaman berbasis bunga tidak menonjol, karena mayoritas Lembaga keuangan beroperasi dengan sistem Islam.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902

Dalam sistem berbasis bunga, uang tidak dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai, alat tukar, dan unit hitung secara efektif dan efisien karena digunakan sebagai komoditas yang dapat dijual dan dibeli. Oleh karena itu, bunga (riba) mengalihkan uang dari fungsi dasarnya. Banyak negara-negara berkembang seperti Nigeria dulu dan masih terjebak dalam perangkap utang sebagai akibat dari perkalian geometris dari jumlah yang harus dibayar sebagai akibat dari akumulasi bunga dan biaya layanan. Itu sebabnya kreditur secara tidak langsung mendikte jalan ke depan untuk negara. Cara tersalur selalu menguntungkan mereka.

Oleh karena itu, bunga dipandang sebagai mekanisme memperbudak suatu bangsa dan rakyatnya. Ketika tingkat inflasi naik, tingkat bunga nominal kemungkinan besar akan meningkat. Konsekuensinya adalah akan terjadi penurunan permintaan uang untuk investasi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (GDP, karena tidak ada barang fisik yang diproduksi. Ini tidak terjadi dalam ekonomi Islam di mana bunga dilarang.

Larangan bunga sebagai salah satu bentuk riba dan mengorganisir Lembaga intermediasi keuangan untuk menggunakan prinsip bagi hasil akan mendukung minimalisir elemen-element agregat yang tidak esensial, tidak produktif, dan spekulasi permintaan uang. Minimisasi elemen permintaan uang akan cenderung mengefisiensikan dan kesetaraan yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya yang langka sehingga membantu mengurangi ketidakseimbangan makroekonomi yang menonjolkan tekanan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi yang akan merusak realisasi tujuan sosial ekonomi (Chapra, 1996).

Sistem ekonomi konvensional dengan system bunganya telah menunjukkan banyak kelemahan dan kegagalan dalam menstabilkan ekonomi. Sistem ekonomi konvensional tidak akan memecahkan masalah ekonomi dunia, namun menciptakan dan menambah masalah. Masalah yang dapat timbul antara lain adalah krisis ekonomi, kemiskinan, dan distribusi yang tidak merata(Moi, 2016).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak masalah yang terjadi sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena teori konvensional yang tidak mampu mengatasinya. Maka dari itu harus segera diambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Penerapan ekonomi Islam dengan system bebas bunga akan membantu memperkecil permasalahan ekonomi khususnya dibidang moneter berupa tingkat inflasi yang lebih rendah.

SIMPULAN

Inflasi sudah terjadi sejak lama, bahkan pada masa Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin sudah terjadi inflasi. Al Maqrizi menyatakan ada dua jenis inflasi yaitu *natural inflation* dan *human error inflation*, dimana kedua inflasi tersebut telah terjadi pula pada masa pemerintahan Islam dahulu. Islam memandang bahwa uang hanya merupakan alat tukar dan satuan hitung sehingga seharusnya harga akan seimbang, Namun demikian rasio antara uang dan barang serta permintaan dan penawaran dapat menjadi tidak seimbang dan muncullah inflasi. Islam melarang praktik monopoli, ikhtikar, riba dan gharar untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menerapkan prinsip bagi hasil, sewa dan jual-beli sehingga bunga tidak terlibat dalam system ekonomi Islam. Pada perkembangannya, ulama dan para ekonom Islam juga melakukan penelitian untuk mengatasi inflasi yang mungkin terjadi antara lain menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang Islami. Pada kenyataannya, negara yang berbasis konvensional (menerapkan sistem bunga) mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak menerapkan sistem bunga. Kondisi ini menunjukkan secara nyata bahwa penerapan sistem bebas bunga dalam ekonomi jauh lebih baik

dibandingkan dengan penerapan sistem bunga. Maka tidak terbantahkan bahwa kestabilan ekonomi akan lebih baik dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang bebas bunga.

REFERENSI

Ahmad, A. Y. (2017). The Role of Money in Financial Instability and Possibilities of Reformation within an Islamic Financial System. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 30*(3).

Akbar, N. (2019). Proving Al Maqrizi's Concept of the Determinat of Inflation Cross Border Analysis. *Journal of Islamic Monetery Economics and Finance, 3*(4), 873-890.

Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.

Atika. (2018). *Comparative Analysis of Islamic Monetary Economic System with the Conventional Monetary Economic System Reviewed from the Stability of the Indonesian Economy.* Paper presented at the International Conference of ASEAN Perspective and Policy.

Bashir, A. H. M. (2002). The welfare effects of inflation and financial innovation in a model of economic growth. *Journal of Economic Studies, 29*(1), 21-32. doi:10.1108/01443580210414094

Chapra, M. U. (1996). Monetary Management in an Islamic Economy. *Islamic Economic Studies, 4*(1).

Elhannani, F. E. d. (2013). *Monetary Policy Instrument and Inflation: An Islamic Perspective*. Paper presented at the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), Kuala Lumpur.

Huda, N. d. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta

Kencana Prenada Media Group.

Kareem, M. K. (2013). Inflation and the Macro Economic Problems in Nigeria: an Islamic Perspectif. *Al-Fikr, 25*.

Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Karim, A. A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kia, A. (2014). Inflation: Islamic and Conventional Economic System-Evidence from the Unites States. *International Journal of Economic Perspective; Mersin, 8*(3).

Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro: Terjemahan* (Vol. Salemba Empat): Jakarta.

Moi, M. R. (2016). *Concept of Sustainable Development from Islamic Perpective.* Paper presented at the InternationalConference on Management and Muamalah.

Nazir, M. (2012). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter: Buku 2 Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Rahardja, P. d. (2004). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar* (2 ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Rizqon, A. L. (2022). Al-Maqrizi's Inflation Concepts and Proff for the East Java Inflation Case 2015-2020. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6*(1), 99-120.

Selim, M. (2019). Interest-free Monetary Policy and Its Impact on Inflation and Unemployment. *ISRA International Journal of Islamic Finance 11*(1).

Siregar, S. e. (2020). The Inflation Theory in The Perspective of Al Maqrizi's Thought and it's implication in the Modern Economic WOrd. *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRC Journal), 3*(2), 1128-1133.

Suar, A. (2020). Al Maqrizi View on Islamic Economy and Its Relevance to Covid-19 Pandemic in Indonesia. *NURANI, 20*(1), 83-96.

Suharti, S. (2021). Inflation Effect on Unemployment in Indonesia: a Comparatifve Studies Between Sharia and Convensional Economic Perspective. *Jurnal Bisnis Strategi, 30*(2), 127-138.

Sukirno, S. (2002). *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zainal, M. K. b. (2020). Inflation: Lesson from al Maqrizi. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 12*(2), 85-113.

Zarqa, M. A. (1983). Stability in an Interest Free Islamic Economiy: a Note. *Pakistan Journal of Applied Economics, 11*(2), 181-188.

https://tafsirweb.com/7405-surat-ar-rum-ayat-41.html.